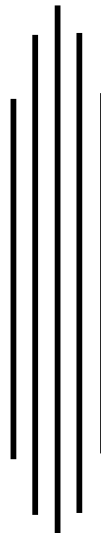




**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
DEWAN PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DPP KORPRI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2012-2017**



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI  
KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**2014**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang pemerintahan , maka Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat : indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikutsertakan berbagai elemen yang terkait pada sektor pemerintahan dan mendorong peran serta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanganan masalah pembangunan kurun waktu 2012-2017.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ini diharapkan akan menjadi acuan dalam melakukan tugas di bidang pemerintahan dengan menitik beratkan pada terciptanya sistem pemerintahan yang baik melalui program-program yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya aparatur dengan pendekatan 1) Politik, 2) Teknokratik, 3) Partisipasi, 4) Atas bawah (*top down*), dan 5) Bawah atas (*bottom-up*).

Situasi anggota KORPRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan pada keadaan dan situasi moralitas, tingkat kesejahteraan anggota KORPRI.

### **1.1 Landasan Hukum**

Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian, landasan Renstra adalah sama dengan landasan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Secara spesifik landasan tersebut adalah :

Landasan idiil yang digunakan yaitu Pancasila.

#### **b. Landasan Konstitusional**

Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya :

- 1) Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
- 3) Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 4) Pasal 28 H ayat (1); setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 5) Pasal 34 ayat (2); Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

#### **c. Landasan Operasional**

- 1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- 2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJMN).

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Daerah.
- 12) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata kerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja SKPD dan berbagai kebijakan pembangunan pemerintahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun. Diharapkan dengan adanya rencana strategis SKPD pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung difungsikan sebagai pedoman pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan sumber daya aparatur.

Renstra pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud sebagai berikut :

- i. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.

- untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- iii. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung secara umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - iv. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  - v. Memudahkan pemangku kepentingan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung di Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

### **Tujuan Khusus**

Rencana Strategis Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2017 bertujuan untuk menetapkan visi dan misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dan menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017.

### **Tujuan Umum**

1. Tersusunnya Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017.
2. Menetapkan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya dibidang pemerintahan.
3. menyiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional bidang pemerintahan.
4. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai peningkatan sumber daya aparatur yang setinggi-tingginya.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana strategis. Di samping itu dilengkapi dengan maksud dan tujuan khusus serta tujuan umum, landasan hukum penyusunan rencana strategis yang terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional, kedudukan dan peranan Rencana Strategis Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan daerah serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEP. BANGKA BELITUNG

Bab ini memuat tentang kedudukan dan peranan Renstra SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan daerah dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2011, termasuk sumber daya Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dan kinerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM, juga menguraikan tantangan dan peluang pengembangan pembangunan pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, rumusan perubahan dan kecenderungan masa depan pembangunan.

## BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung (internal dan external), Telaahan Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Telaahan Renstra KL dan Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

## AN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam bab ini memuat rumusan Visi, Misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang disajikan dalam bentuk tabel beserta target capaian kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, Kebijakan dan strategi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran perbidang yang memuat tahapan strategi untuk mendukung tercapainya kinerja pembangunan kesehatan.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini memuat program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, rumusan perubahan internal dan external , indikator capaian hasil , program lintas Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, program lintas kewilayahan termasuk alokasi penganggaran Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung pencapaian kinerja program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi ulasan singkat dalam memuat kaidah pelaksanaan program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang antara lain berisi penjabaran dari tujuan Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai evaluasi dari pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.



## **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

### **2.1 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Daerah**

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Renstra SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit mengenai Renstra SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, namun Undang-undang ini mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 seperti hal Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renstra SKPD. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang menggambarkan target capaian kinerja Sekretariat DPP KORPRI sehingga mempermudah untuk ditransformasikan kedalam rencana kerja tahunan (Renja).

Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Daerah.



KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah.

Anggota KORPRI sebagai aparatur sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peningkatan sumber daya aparatur merupakan kontribusi penting untuk kemajuan ekonomi, banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan sumber daya aparatur antara lain kemampuan pemerintah untuk menyaring SDM yang berkualitas, termasuk Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung harus berperan aktif dalam pencapaian pembangunan tersebut, begitu juga instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat ikut membantu peningkatan sumber daya aparatur.

Berdasarkan hasil seminar dengan topik “Redefenisi dan Reposisi Kedudukan dan Peran KORPRI dalam Era Reformasi Birokrasi” bertempat di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan dalam rangka HUT KORPRI yang ke-40 dan guna menyempurnakan peraturan kepegawaian dengan diusulkannya rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan KORPRI dapat menjadi wadah organisasi profesi. Untuk menjadi organisasi profesi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai kompetensi mengadili pelanggaran kode etik
- b. Bercorak membina profesi
- c. Mencari wadah peningkatan kompetensi
- d. Bersifat Non Politis, namun dalam rancangan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) masih diperdebatkan KORPRI dalam memilih KORPRI termasuk sebagai wadah organisasi profesi, atau dalam kedinasan, diluar kedinasan ataupun sebagai organisasi paguyuban.

pemerintahan yang baik (good governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan serta cita-cita bangsa untuk bernegara, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dalam era reformasi saat ini, setiap organisasi publik diharapkan lebih dapat memberikan *transparansi* serta *akuntability* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pencapaian tujuan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung secara khusus bertujuan untuk memberi dukungan pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk memastikan bahwa Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung diprioritaskan dalam rencana pembangunan nasional, dilakukan dengan untuk mensinergikan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus diselaraskan dengan pembangunan nasional, oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan harus mengacu pada Sistem Pembangunan Nasional.

## **2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DPP KORPRI.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif yang berstruktur kerja sebagai berikut :

1. Sekretaris DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
2. Bagian Umum dan Kerjasama
  - Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
  - Subbag Kerjasama Keuangan
3. Bagian Olahraga, Seni dan Budaya, Mental dan Rohani
  - Subbag Olahraga, Seni dan Budaya
  - Subbag Mental dan Rohani
4. Bagian Usaha dan Bantuan Hukum dan Sosial
  - Subbag Usaha dan Kesejahteraan
  - Subbag Bantuan Hukum dan Sosial

### **2.3 Sumber Daya Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Pengembangan aparatur diarahkan untuk menciptakan sumber daya aparatur yang ahli, terampil dan bermutu serta merata dan mencukupi jumlahnya. Diharapkan di setiap tatanan institusi pelayanan akan tersedia aparatur yang memadai dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Urusan wajib dilaksanakan oleh Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2011 didukung oleh pegawai sebanyak 17 pegawai dengan status kepegawaian 17 PNS, 0 CPNS. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMU sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 12 orang, Golongan II sebanyak 2 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Berdasarkan eselonering, yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang, dan eselon IV sebanyak 6 orang.

## **PP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2012 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2012 berdasarkan program, kegiatan dan realisasi tahun anggaran, telah dilaksanakan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya sumber daya aparatur.

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah telah dilaksanakan pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- 1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Bagi PNS/Anggota KORPRI** *output* : ( Terlaksananya PKPA bagi PNS/anggota KORPRI dalam membentuk LKBH sehingga terwujud Pengayoman dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota KORPRI Yang Tersangkut Masalah Hukum pada tahun 2012 sebanyak 1 orang, pada tahun 2013 sebanyak 4 orang.
- 2. Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung** *output* : ( Terlaksananya Pengukuhan & Pelantikan DP Kab/Kota KORPRI & DP Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI) pada tahun 2011 pelantikan dan pengukuhan DP KORPRI Kabupaten Bangka Selatan, Belitung Timur dan Muscab Belitung.
- 3. Pemberiaan penghargaan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti** *output* : (terlaksananya pemberian penghargaan dan bantuan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti TA 2010 sebanyak 10 orang, TA 2011 sebanyak 32 orang, bantuan kepada PNS yang sakit sebanyak 18 orang, bantuan kepada PNS yang meninggal dunia 3 orang. Pada tahun 2012 dan 2013 tidak dilaksanakan pemberian penghargaan dan bantuan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti).

## **Qur'an (MTQ) KORPRI Tk. Nasional I**

*output* : ( Terlaksananya pengiriman MTQ KORPRI tingkat Nasional I sebanyak 4 cabang MTQ ).

### **5. Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

*output* : Meningkatnya rasa kebersamaan dan kesetiakawanan anggota KORPRI.

### **6. Pekan Olahraga KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

*output* : (Terpilihnya Atlet KORPRI yang berprestasi sebanyak 6 cabang olahraga.

### **7. Sosialisasi Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010**

dilaksanakan pada tahun 2011 *out put* : terlaksananya sosialisasi Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI bagi DP KORPRI Kab/Kota sebanyak 14, DP Unit Provinsi KORPRI instansi vertikal sebanyak 18 orang dan DP Unit KORPRI Dinas/Bada sebanyak 128 orang.

### **8. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga antar anggota KORPRI Provinsi dengan KORPRI Kab/Kota**

*output* : Terselenggaranya Pertandingan Olahraga antara anggota KORPRI Provinsi dengan KORPRI Kabupaten Belitung Timur sebanyak 7 cabang olahraga yaitu : tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, catur, futsal, bola kaki dan voli ball.

### **9. Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

*out put* : Terlaksananya pembinaan rohani berupa ceramah agama bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 kali pada tahun 2013.

PNS yang akan memasuki masa Purnabhakti out put : terlaksananya pembekalan teknis bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun sehingga siap dan mempunyai keterampilan dalam masa pensiun yang diikuti 45 orang PNS yang akan pensiun di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung yang dilaksanakan pada tahun 2013.

- 11.** Sosialisasi Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara out put : terlaksananya sosialisasi RUU ASN yang diikuti oleh 75 orang peserta dari masing-masing SKPD dan DP KORPRI Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada tahun 2013.
- 12.** Musyawarah Provinsi III KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung out put : terlaksananya Musprov III KORPRI Provinsi sehingga terpilih kepengurusan DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2013-2018 yang diikuti oleh 75 orang peserta dari masing-masing SKPD dan DP KORPRI Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada tahun 2013.
- 13.** Pekan Olahraga (PORNAS) KORPRI ke – 13 Tahun 2013 out put : terlaksananya KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengikuti PORNAS KORPRI ke-13 di Manado sebanyak 6 cabang olahraga yaitu : tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, catur, futsal, dan voli ball. pada tahun 2013
- 14.** Pembentukan kepengurusan BAPOR KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2013-2018 out put : terlaksananya Pembentukan BAPOR KORPRI Provinsi sehingga terpilih kepengurusan BAPOR KORPRI Provinsi kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2013-2018 yang diikuti oleh 75 orang peserta dari masing-masing SKPD dan DP KORPRI Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada tahun 2013.



## DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Dalam konteks eksternal, terjadi perubahan dan tantangan strategis berupa berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, transportasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Berbagai perubahan tersebut memberi dampak positif maupun negatif di bidang pemerintahan. Dampak positif antara lain berupa berkembangnya teknologi dan ilmu baru, sedangkan dampak negatif yaitu era pasar bebas yang akan mendorong terjadinya persaingan bebas.

Era Globalisasi merupakan tantangan, masalah dan potensi untuk pembangunan nasional berwawasan kebangsaan di masa mendatang. Adanya perdagangan bebas, sumber daya aparatur yang ikut mengglobal, terorisme dan sebagainya perlu diantisipasi secara serius dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan pelayanan melalui berbagai kesepakatan internasional, akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan dan memerlukan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil seminar dengan topik “Redefenisi dan Reposisi Kedudukan Peran KORPRI dalam era Reformasi Birokrasi” dalam rangka penyempurnaan peraturan kepegawaian dengan diusulkannya rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan KORPRI dapat menjadi wadah organisasi profesi.

Untuk itu sebelum Undang-undang tersebut terbentuk, KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tantangan maupun peluang pada tahun yang akan datang dengan melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

Pembentukan LKBH KORPRI dibutuhkan secara administrasi Surat Keputusan Kepala Daerah dalam menentukan dan menetapkan anggota yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang berada dalam kepengurusan LKBH tersebut. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi anggota KORPRI.

amata berupa emas kepada PNS yang pensiun, mengalami kendala dikarenakan proses administrasi pengadaan emas tersebut harus dilelangkan. Tetapi tidak ada pihak ketiga yang berminat untuk melaksanakannya dikarenakan harga emas yang tidak stabil (Naik turun).

#### **Tantangan masa depan :**

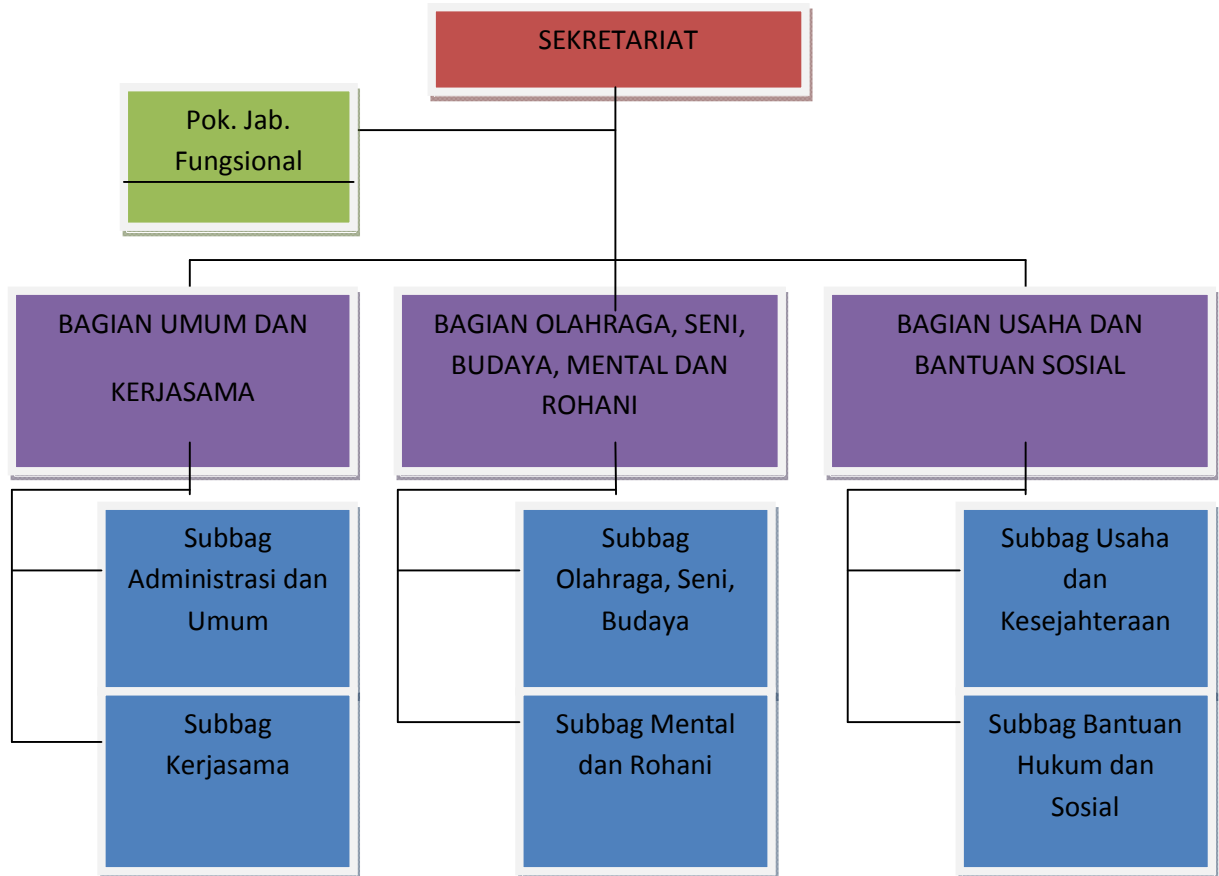
1. Kesenjangan penempatan pegawai pada SKPD dilingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Sekretariat DPP KORPRI bahwa menjelang tahun 2025 pemenuhan kebutuhan SDM bagi pembangunan telah dapat dicapai.
3. Perubahan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional yang dapat mengancam pembangunan termasuk perdagangan bebas.

#### **Pengembangan Pembangunan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Dalam pengembangan aparatur, Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan berbagai pedoman dan standar, penelitian dan pengembangan aparatur, pengembangan sistem informasi, memfasilitasi kabupaten/kota dalam memenuhi komitmen nasional dan global, serta mendorong peran aktif masyarakat.

- a. Dengan makin kompleksnya pembangunan, berbagai standar dan pedoman yang ada dewasa ini belum cukup memadai.
- b. Selama ini di lingkungan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berbagai jenis sistem informasi telah berhasil dikembangkan, tetapi dengan berlakunya asas desentralisasi, berbagai sistem informasi tersebut perlu ditinjau kembali.

### Struktur Organisasi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung



awai Sekretariat DPP KORPRI

Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Urutan Kepangkatan

No.	Pegawai berdasarkan golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Penata Tk I, III/d	2
3.	Penata, III/c	5
4.	Penata Muda Tk. I, III/b	2
5.	Penata Muda, III/a	2
6.	Pengatur Tk. I, II/d	1
7.	Pengatur, II/b	2
8.	Pengatur, II/a	1
9.	Juru Muda, I/a	1
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

## **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 – 2012 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis 2007 – 2012, Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung menyusun kembali Renstra tahun 2012 – 2017 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berpekan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Oleh karena itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan

dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional dan internasional.

Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPP Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala antara lain :

**1. Internal**

- a. Kurangnya SDM Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan SKPD

Masih kurangnya tenaga perencana dan penyusunan Laporan SKPD yang menyebabkan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan belum berjalan maksimal.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Masih kurang sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tidak berjalan lancar.

- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas pembinaan aparatur

Kemitraan yang dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dalam upaya pembinaan aparatur, karena kemitraan belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

- d. Kurangnya koordinasi, pembinaan serta monitoring pada tingkatan Kepengurusan KORPRI

Koordinasi, pembinaan serta monitoring pada setiap tingkat kepengurusan KORPRI perlu ditingkatkan guna menyamakan persepsi.



M bagian pengarsipan

Belum terlatihnya tenaga bagian arsiparis sehingga pelaksanaan kearsipan belum tertata dan berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama sehingga diberbagai tingkat administrasi belum terpadu dan berkesinambungan.

f. Kurangnya SDM pengelola aplikasi keuangan dan barang

Dalam pelaksanaan kegiatan aplikasi keuangan dan barang SDM pengelola aplikasi yang handal sangat dibutuhkan, dengan minimnya jumlah tenaga yang berkompeten pada kegiatan pertanggungjawaban laporan keuangan dan barang. Masih kurangnya tenaga yang berkompeten/bersertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa mengakibatkan pengadaan dan sejumlah pengadaan barang lainnya masih banyak ditemui permasalahan dalam pemeriksaan, serta kekurangpastian jaminan/bantuan hukum pada pegawai sebagai panitia pelaksana kegiatan pengadaan mengakibatkan tidak terealisasinya beberapa kegiatan pengadaan terutama pengadaan dikarenakan ketidakbersediaan pegawai terlibat dalam kegiatan pengadaan barang tersebut.

g. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kepegawaian

Kegiatan pelayanan bagian kepegawaian meliputi seluruh tata usaha kepegawaian, dimana tupoksi dari kepegawaian yang menyebabkan jumlah kegiatan menjadi cukup banyak dengan jumlah pegawai yang terbatas sehingga membuat hasil pelaksanaan kegiatan belum tercapai secara optimal.

## 2. Ekternal

a. Belum optimal koordinasi program Nasional dan Kabupaten/Kota

Dalam tata laksana program kegiatan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung ditemui berbagai perbedaan antara lain adalah masih adanya perbedaan kualitas SDM, disamping

- tersedia secara keseluruhan, pensosialisasian dalam penerbitan peraturan dan program kegiatan lainnya belum berjalan secara optimal, pada tingkat nasional terjadi proses politik, seperti desentralisasi, demokratisasi, dan politik yang berdampak pada anggota KORPRI.
- b. Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan.  
Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan pemantauan dan evaluasi di bidang aparatur menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat tidak sesuai jadwal, belum lengkap dan kurang akurat.
  - c. Kurangnya prestasi di bidang olahraga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - d. Kurangnya pemahaman dalam menilai serta menata akhlak dan budi pekerti di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - e. Kurangnya perbaikan mental Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan public yang baik untuk masyarakat.
  - f. Kurangnya pemahaman, informasi dan rasa memiliki jiwa seni serta kurangnya menjiwai dan mempraktekkan budaya melayu dalam keseharian bekerja dan bersosialisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - g. Belum optimalnya hubungan kerjasama mengenai usaha dan kesejahteraan anggota dengan lembaga lain;
  - h. Belum adanya jiwa kewirausahaan untuk meningkat kesejahteraan anggota KORPRI.

## Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan

### Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Visi yang diinginkan pada akhir periode 2012 – 2017 adalah : “ ***Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi local melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan***”.

Dimana visi tersebut memiliki makna :

- a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah
- b. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang menguntungkan
- c. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh kedepan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah dinegara-negara maju.
- d. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki
- e. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, insentif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan.
- f. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung

in secara langsung dengan fungsi SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah misi kelima yaitu Perwujudan Good Governance dan clean Government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung, dimana Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fokus arah kebijakan yang akan di prioritaskan dengan meningkatkan mutu pelayanan bagi aparatur secara terstandarisasi sesuai dengan kompetensi dimasing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Salah satu sasaran strategis program pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah Terwujudnya kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota dimana bentuk perhatian Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung terhadap anggota KORPRI adalah meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan anggotanya melalui pembinaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keusahaan serta hukum dan sosial.

### **3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Provinsi Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan, yang harus menjadi perhatian Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan peran KORPRI di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Isu Strategis yang berhubungan dengan masalah Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan SKPD
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas pembinaan aparatur
- d. Kurangnya koordinasi, pembinaan serta monitoring pada tingkatan Kepengurusan KORPRI
- e. Kurangnya kualitas SDM bagian pengarsipan
- f. Kurangnya SDM pengelola aplikasi keuangan dan barang
- g. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kepegawaian
- i. Belum optimal koordinasi program Nasional dan Kabupaten/Kota
- j. Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan.

di bidang olahraga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- l. Kurangnya pemahaman dalam menilai serta menata akhlak dan budi pekerti di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- m. Kurangnya perbaikan mental Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan public yang baik untuk masyarakat.
- n. Kurangnya pemahaman, informasi dan rasa memiliki jiwa seni serta kurangnya menjiwai dan mempraktekkan budaya melayu dalam keseharian bekerja dan bersosialisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- o. Belum optimalnya hubungan kerjasama mengenai usaha dan kesejahteraan anggota dengan lembaga lain;
- p. Kurangnya kesejahteraan anggota KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Program	Kegiatan	Realisasi Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1. Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI			√	√	√	√
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	2. Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Purna Tugas			√	√	√	√
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya	3. Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Sakit			√	√	√	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya	4. Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Meninggal Dunia			√	√	√	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya	5. Pemberian Beasiswa kepada Putra-Putri Anggota KORPRI yang berprestasi			√	√	√	√

	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	11. dan Pengembangan Koperasi KORPRI				√	√	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	7. Sosialisasi KEPPRES					√	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8. Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran					√	√
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya	9. Bakti Sosial KORPRI dan Masyarakat			√	√	√	√
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi PNS/Anggota KORPRI Tahun 2012					√	√
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	11. Pekan Olahraga KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						√

## **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### **4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Untuk mendukung pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang dicanangkan dalam RPJMD Tahun 2012 s.d Tahun 2017, Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu dari penyelenggara mempunyai visi :

**“ TERWUJUDNYA KORPRI YANG KUAT, NETRAL, DEMOKRATIS  
UNTUK MEMBANGUN JIWA KORPS (KORSA) PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA DAN MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA DAN  
KELUARGANYA“**

#### ***Misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung***

Untuk mencapai visi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung maka telah ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

Misi pertama : Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan.

Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik

Misi kedua : Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara.

Misi ketiga : Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.

Misi keempat : Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin, bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik.

Misi kelima : Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

## 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat KORPRI Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 s.d tahun 2017 yaitu :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Mewujudkan organisasi KORPRI dengan paradigma dan struktur organisasi yang sesuai di semua tingkatan kepengurusan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- d. Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan anggotanya melalui pembinaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keusahaan serta hukum dan sosial.
- e. Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi dengan seluruh instansi terkait.

## 2. Sasaran

- a. Terwujudnya organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan.
- b. Terciptanya solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara.
- c. Terwujudnya kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.
- d. Terciptanya Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin, bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik.
- e. Terwujudnya KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

## 4.3 Kebijakan dan Strategi

### **Kebijakan dan Strategi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

untuk menunjang pembangunan yang dituangkan pada Renstra Sekretariat DPPKORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

## si 1 :

Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan serta optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi : Bagian Umum dan Kerjasama, Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani. Bagian Usaha dan Bantuan Hukum.
- Merencanakan dan melaksanakan untuk kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel.
- Membentuk organisasi KORPRI dengan paradig baru dan struktur baru.
- Membentuk Sekretariat tetap KORPRI dengan paradig dan struktur baru.
- Mengembangkan dan pengefektifan komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatan kepengurusan.
- Meningkatkan kerjasama dengan organisasi sejenis
- Pengembangan anggota KORPRI yang pegawainya digaji melalui APBN dan APBD
- Membentuk BAPOR KORPRI, LKBH KORPRI, BAPENI KORPRI.
- Melaksanakan MUSPROV KORPRI, MUSPROV BAPOR KORPRI dan Rapat-rapat kerja KORPRI yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi kegiatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.
- Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.
- Meningkatkan kegiatan penghimpunan bahan-bahan rapat, notulen, laporan, surat-surat keputusan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

## si 2 :

Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan soliditas organisasi.
- Menerapkan system pengawasan atasan langsung sevara berjenjang dalam rangka peningkatan disiplin anggota KORPRI.
- Menerapkan system tata upacara yang berlaku bagi anggota KORPRI
- Melaksanakan tata upacara persemayaman dan upacara pemakaman anggota KORPRI yang meninggal dunia dimasa dinas maupun purna dinas.
- Meningkatkan upaya pembinaan karir pegawai berdasarkan merit system terlepas dari intervensi politik.
- Meningkatkan rasa nasionalisme/sadar kebangsaan bagi anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

## **Kebijakan dan Strategi Misi 3 :**

Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hokum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan usaha Koperasi yang mempunyai jejaring pengembangan usaha, pemasaran, distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan hasil usaha.
- Meningkatkan penerimaan uang tabungan pension bagi PNS.
- Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui ASKES bagi anggota KORPRI.
- Mendorong terbangunnya perumahan bagi anggota KORPRI.
- Mengupayakan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit KORPRI.
- Mendorong pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas) yang sahamnya dimiliki oleh anggota KORPRI.
- Mengupayakan pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi anggota KORPRI.
- Menjamin pelaksanaan ziarah keagamaan sesuai keyakinan anggota KORPRI.
- Mendorong pembangunan lembaga pendidikan formal dan informal yang dikelola oleh KORPRI.



THR bagi anggota KORPRI.

- Mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).
- Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota KORPRI.
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk membangun kesedaran hokum anggota KORPRI.
- Pendampingan, bantuan hokum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum.

#### **Kebijakan dan Strategi Misi 4 :**

Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin, bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut :

- Mengupayakan terbangunnya system pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrasi professional karir.
- Mengupayakan teradopsikan materi-materi KORPRI dalam kurikulum dan silaby pada pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjenjangan jabatan struktural dan fungsional.
- Mengembangkan suatu system pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI dan institusi.
- Mengupayakan pengurus KORPRI diangkat menjadi anggota BAPERJAKAT.
- Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional.
- Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan melalui pembinaan keagamaan secara rutin bagi anggota KORPRI.

#### **Kebijakan dan Strategi Misi 5 :**

Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik, adalah sebagai berikut :

- Berperan aktif untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
- Melaksanakan tugas sebagai PNS/Anggota KORPRI secara professional.
- Melaksanakan program sesuai perencanaan dengan pelaporan secara berkala.
- Melaksanakan evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi, akuntabel dan partisipatif.
- Menciptakan situasi dan lingkungan kerja yang kondusif.

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1 Program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012-2017 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional, maka Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada prioritas kebutuhan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, termasuk melaksanakan berbagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam urusan wajib program untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut :

#### **A. Program Kegiatan Rutin**

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

#### **B. Program Kegiatan Urusan Wajib**

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
( Indikator Kinerja / outcome ) Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  
( Indikator Kinerja / outcome ) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
( Indikator Kinerja / outcome ) Terciptanya kesadaran aparatur untuk berolahraga.

## Internal dan Eksternal

Perubahan eksternal dan internal perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas agar lebih efektif dan efisien dengan mengoptimalkan upaya Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk dan cara dalam penyelenggaraan pemerintahan berkualitas meliputi berbagai peningkatan program pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

### **a. Peningkatan Kompetensi Perencana**

Sistem perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara optimal, dengan memanfaatkan data informasi yang memadai (*evidence base*), bagian perencana juga harus memiliki kompetensi antara lain mempunyai kemampuan DHA, mampu melakukan perencanaan berbasis kinerja dan mampu menganalisis situasi yang terkoordinasi, komprehensif dengan mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan.

### **b. Pembinaan dan Pengawasan**

Masalah pelayanan pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan minimal (SPM), pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi dan penegakan hukum.

### **c. Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI**

Pembiayaan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya pengalokasian dan pembelanjaan dana Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan guna mencapai kesejahteraan anggota KORPRI.

### **d. Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur**

Pengembangan dan pemberdayaan SDA sangat diperlukan guna mendukung penyelenggaraan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang setinggi-tingginya.

penyediaan SDA yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata serta dapat didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung. Perencanaan SDM terdiri dari penetapan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi aparatur sesuai dengan kebutuhan, peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar dapat sesuai standar dan mempunyai kompetensi dalam penguasaan iptek, profesional dalam bertugas, beriman dan bertaqwa, mandiri, bertanggungjawab serta berdaya saing tinggi.

#### **e. Kerjasama**

Dalam memperoleh dukungan pada upaya pelaksanaan pembangunan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung diperlukan kemitraan dari berbagai pihak, seperti melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, serta masyarakat agar dapat terwujud dukungan sumber daya dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3 Indikator Capaian Hasil**

#### **A. Program Kegiatan Rutin**

##### **I. Program pelayanan administrasi perkantoran**

Sasaran hasil adalah meningkatnya ketersediaan kebutuhan kantor untuk menunjang terlaksananya operasional Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017 adalah :

1. Persentase ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang terlaksananya operasional kantor
2. Jumlah laporan keuangan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### **in Sarana dan Prasarana Aparatur**

Sasaran Hasil adalah : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional penunjang kinerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017 adalah :

1. Persentase pemeliharaan sarana prasarana operasional Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
2. Persentase pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Sasaran Hasil adalah : Tersedianya kebutuhan PDH pegawai dalam menjalankan tupoksi instansi

1. Persentase ketersediaan pakaian dinas untuk menunjang kinerja pegawai

Sasaran Hasil adalah : Meningkatnya disiplin aparatur

Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017 adalah :

1. Persentase disiplin aparatur meningkat.

### **I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Sasaran Hasil adalah : Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017 adalah :

1. Jumlah Dokumen DIPA bagi Satker.
2. Jumlah dokumen Laporan Satker.
3. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Satker.
4. Jumlah yang ditingkatkan / dilatih kemampuannya.
5. Jumlah SDM Sekretariat DPP KORPRI yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan.
6. Persentase kinerja aparatur meningkat

### **II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Sasaran hasil adalah : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

ran tersebut pada tahun 2017 adalah :

1. Persentase Provinsi dan Kab/ Kota yang memiliki laporan.
2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan penyusunan anggaran program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
3. Persentase jumlah tenaga perencana program Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
4. Jumlah dokumen bahan pelaporan tingkat provinsi
5. Jumlah dokumen monitoring & evaluasi

### **III. Program Pembinaan dan pemyarakatan Olahraga**

Sasaran Hasil adalah : Meningkatnya kesadaran aparaturnya untuk berolahraga.

Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017 adalah :

1. Jumlah aparaturnya yang mengikuti olahraga
2. Jumlah cabang olahraga yang diikuti
3. Jumlah atlet yang berprestasi
4. Persentase aparaturnya yang mengikuti olahraga
5. Persentase cabang olahraga yang diikuti atlet yang berprestasi

Plan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan  
Pendanaan Indikator Pada Sekretariat DPP KORPRI  
Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATIF
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi PNS/Anggota KORPRI		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Persiapan, pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan DP Kab/Kota KORPRI, DP Unit Provinsi dan DP Provinsi Kep.Babel		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Musyawarah Provinsi III KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Pembekalan Teknis bagi PNS yang akan memasuki masa Purnabhakti, yang sakit dan meninggal dunia		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Pembinaan Rohani/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Pemberian beasiswa bagi putra/putri PNS Gol. II dan III di Provinsi Kep. Babel		Anggota KORPRI	APBD/APBN
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			



		Pengembangan Aparatur	kepada PNS yang memasuki masa Purnabhakti dan Bantuan kepada PNS/CPNS yang sakit dan meninggal dunia		Anggota KORPRI	APBD/APBN
			Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Anggota KORPRI	APBD/APBN
			Seleksi MTQ KORPRI Provinsi Kep. Babel		Anggota KORPRI	APBD/APBN
			Pembentukan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) KORPRI Provinsi Kep. Babel		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Pembinaan dan Pemasayaran Olahraga	PORPOV KORPRI		Anggota KORPRI	APBD/APBN
			Pertandingan Olahraga KORPRI Provinsi dengan Kab/Kota		Anggota KORPRI	APBD/APBN
			Pertandingan Olahraga dan Silaturahmi antar Provinsi		Anggota KORPRI	APBD/APBN
			Pembentukan Kepengurusan BAPOR KORPRI Kep. Bangka Belitung Masa Bhakti 2013-2018		Anggota KORPRI	APBD/APBN
		Peningkatan Kesatuan Jiwa Korps dan Kebanggaan terhadap organisasi	Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Anggota KORPRI	APBD/APBN

**PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan serangkaian perencanaan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung pada 5 (lima) tahun kedepan ( tahun anggaran 2012-2017).

Dari kinerja yang terlaksana masih ada beberapa indikator kinerja yang mengalami penurunan atau tidak mencapai target, hal ini secara umum disebabkan:

1. Pelaksanaan di bidang perencanaan belum maksimal.
2. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Sarana dan prasarana gedung kantor yang belum memadai dan representative.

Dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dalam bidang perencanaan sehingga pengelolaan kinerja dapat berjalan dengan lancar.
- b. Peningkatan rapat koordinasi internal kantor dalam rangka sinkronisasi kegiatan..
- c. Mendorong sumber daya aparatur yang ada untuk lebih efektif dan efisien serta diharapkan memiliki dampak di masa yang akan datang dalam mengelola kegiatan sesuai dengan visi dan misi instansi.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kantor, seperti pengadaan listrik yang cukup serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pangkalpinang, Januari 2014  
**SEKRETARIAT DPP KORPRI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS,**

**NAJAMUDIN, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580119 197910 1 001